BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era reformasi saat ini di setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik biasa disebut sebagai *good goverment governence* di seluruh dunia, begitupun di Indonesia. Dengan berjalannya otonomi daerah termasuk dalam bagian dari reformasi hidup pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah kebijakan pemerintah pusat dalam segelintir bidang diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah (Angga Dwi Permadi, 2013).

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapabilitas dan efektivitas dalam menjalankan roda pemerintah (Abdul Halim, 2014: 23). Konsekuensi implementasi dari Otonomi Daerah, Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangannya mulai dari perencanaan sampai dengan realisasi dan pertanggungjawabannya, termasuk di dalamnya pengamanan atas aset pemerintah daerah yang di biayai dengan anggaran Pemerintah secara efektif dan efisien (Abdul Halim, 2014: 271). Namun pada kenyataannya, pemerintah daerah umumnya belum menjalankan fungsi dan peranan secara efisien, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah (Abdul Halim, 2014: 23).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK, pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan

dalam laporan keuangan (Ifa Ratifah, 2012:30). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) (Liza rahayu dkk, 2014).

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelas, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum dan berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan , Opini Tidak Wajar (TW) yaitu laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, Opini Tidak Memberi Pendapatan (TMP) yaitu penyimpangan yang material dan prinsip akuntansi yang berlaku umum (Indra Bastian 2006:87).

Terdapat fenomena Kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (pemda) yang dikemukakan oleh Anggota BPK bahwa kualitas laporan keuangan masih jauh di bawah target, terindikasi dari rasio perolehan opini wajar tanpa pengecualian yang hanya 30% dari total 524 pemda. Rasio 30% masih jauh di bawah target pemerintah yang mencanangkan minimal 60% pemerintah daerah dapat memperoleh opini WTP. Maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak optimal. Karena pencapaian rasio seharusnya mencapai 60% (Yudi Ramdan, Kepala Biro Humas dan Juru Bicara BPK RI, 2015).

Namun pada kenyataannya berdasarkan dari data BPK, masih rendahnya kualitas dan tata kelola dalam penyusunan laporan keuangan yang dilihat dari kualitas kepatuhan dan opini laporan keuangan WTP dari pemerintah daerah yang baru mencapai 34 %, jika dibandingkan dengan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat yang mencapai kisaran 74%. Oleh karena itu pemda diminta untuk memperbaiki sebagai upaya mendorong peningkatan opini WTP (Harry Azhar Azis, Ketua BPK RI, 2015).

Terdapat 25 pemerintah daerah (pemda) yang dinilai laporan keuangannya masih buruk. Dari pemeriksaan 504 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Semester I Tahun 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 251 daerah, wajar dengan pengecualian (WDP) untuk 230 daerah, tidak wajar (TW) empat daerah, dan tidak memberikan pendapat (TMP) 19 daerah. Dari 19 LKPD yang mendapatkan opini TMP, enam diantaranya adalah daerah yang baru kali pertama menyusun laporan keuangan yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara dan Penukal Abab Lematang Ilir (Sumatera Selatan), Kabupaten Pesisir Barat (Lampung, Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Kabupaten Banggai Laut dan Morowali Utara (Sulawesi Tengah). Terdapat lima LKPD yang sebelumnya mendapatkan opini WDP justru turun ke TMP, yaitu Kabupaten Bandung Barat (KBB), Kabupaten Bangka Selatan (Kepulauan Bangka Belitung), Kabupaten Subang (Jawa Barat), Kabupaten Pandeglang (Banten), dan Kabupaten Yahukimo (Papua). Sedangkan dua daerah yang opininya turun dari WDP ke TW adalah Kabupaten Seiluma

(Bengkulu), dan Kabupaten Belitung Timur (Kepulauan Bangka Belitung) (Harry Azhar Azis, Ketua BPK RI, 2015).

Dalam tiga tahun terakhir terjadi penurunan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Jawa Barat. Sejak tahun buku 2008 belum ada satu pemerintah daerah pun yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)[iii]. Bahkan dengan jumlah daerah yang tidak diberikan pendapat oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau *disclimer* justru bertambah (Tahria Syfrudin, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat 2013).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jabar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016, Kabupaten Bandung Barat masih meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Maman Sunjaya membenarkan hal itu dan menuturkan permasalahan masih di dominasi terkait asset tetap tanah yang dimiliki pemerintah daerah Kab.Bandung Barat yang masih belum bersertifikat, hal ini berpengaruh pada penurunan kualitas laporan keuangan (Maman Sunjaya dalam PikiranRakyat.com 2017). Menurut Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat Arman Syifa, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum menunjukan hasil yang maksimal seperti banyaknya opini BPK yang menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masih terdapat opini *disclaimer* juga sejumlah persoalan perlu mendapat perhatian supaya kualitas tata kelola keuangan lebih baik (Arman Syifa, Kepala BPK Provinsi Jawa Barat 2016).

Menurut Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat Arman Syifa, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum menunjukan hasil yang maksimal seperti banyaknya opini BPK yang menyatakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) masih terdapat opini *disclaimer* juga sejumlah persoalan perlu mendapat perhatian supaya kualitas tata kelola keuangan lebih baik (Arman Syifa, Kepala BPK Provinsi Jawa Barat 2016).

Proses akuntansi atau tata keuangan sudah mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan sistem keuangan modern. Institusi-institusi pemerintahan saat ini, harus makin memperbaiki kualitas kinerja keuangan supaya mampu mengikuti perkembangan akuntansi karena pengguna informasi terutama masyarakat umum menuntut peningkatan akuntabilitas serta transparansi di institusi-institusi pemerintahan. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban mempublikasikan informasi lewat laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, publikasi informasi tersebut dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan para pemakai informasi. Informasi dapat dikatakan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat dipahami, dapat dipercaya dan digunakan oleh pemakai informasi (Andriani dalam I Putu Upabayu Rama Mahaputra, 2014).

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai (Suwardjono,2014:167). Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan,

pengendalian, dan pengambilan keputusan (Indra Kesuma dkk, 2014). Telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomo 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdiri dari : 1) relevan, 2) andal, 3) dapat dibandingkan dan 4) dapat dipahami (Abdul Halim 2014: 91).

Perkembangan teknologi informasi meliputi perkembangan infrastruktur teknologi informasi, seperti perangkat keras, perangkat lunak, tenaga pelaksana, teknologi jaringan dan komunikasi, teknologi database, sistem informasi manajemen. (Tata Sutabri, 2014:31). Penggunaan teknologi informasi di dunia telah semakin luas. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan teknologi informasi yang tidak terbatas. Perkembangan Teknologi Informasi tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis, tetapi juga bidang-bidang lain, seperti bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang pemerintahan, bidang sosial, bidang pertahanan dan keamanan negara, dan lain-lain. Penggunaan teknologi informasi pada pemerintah disebut *e-government*. *E-goverenment* dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Dalam *e-goverenment*, komputer memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah (Tata Sutabri, 2014:147).

Perkembangan teknologi informasi, terutama pada era informasi berdampak signifikan terhadap sistem informasi akuntansi (SIA). Dampak yang dirasakan secara nyata adalah pemrosesan data yang mengalami perubahan dari sistem manual ke sistem komputer. Perkembangan akuntansi yang menyangkut Sistem Akuntansi Informasi (SIA) berbasis komputer dalam menghasilkan laporan keuangan akan mempengaruhi parktik pengauditan (Mia Sari, 2013).

Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan salah satunya adalah penerapan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik (Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika KBB Ludi Awaludin mengatakan bahwa informasi keuangan lambat dan kurang transparan karena masih belum memiliki *website* dan *system* yang baik sebagai manfaat teknologi informasi sehingga memudahkan dalam transparansi informasi keuangan daerah secara akurat dan tepat sehingga memperbaiki kualitas laporan keuangan KBB (Ludi Awaludin dalam PikiranRakyat.com 2017).

Menurut Fajar selaku pegawai bagian keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diketahui bahwa yang berkaitan dengan teknologi informasi yang digunakan, pemerintah daerah masih belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam hal perangkat keras sehingga mengakibatkan kurang mendukungnya terhadap kualitas laporan keuangan yang tepat waktu sesuai periode akuntansi (Fajar, Bendahara I BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, 2018).

Salah satu faktor pendukung tercapainya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang baik yaitu ketersediaan sumber daya manusia. Aktivitas sumber daya manusia adalah unsur yang menentukan kemajuan organisasi bisnis, aktivitas yang terkait adalah SDM, mutasi sistem jenjang karier, penggajian, dan pensiunan karyawan. Untuk mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas melalui informasi tersebut, maka diperlukan kapasitas sumber daya manusia yang berkualitas juga agar mampu menjalankan sistem tersebut dengan baik. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu lembaga atau organisasi (Amran dalam I Putu Upabayu Rama Mahaputra, 2014).

Dalam pengelolaan bagian keuangan harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akuntansi dan ilmu –ilmu keuangan terkait lainnya. Jadi dapat diartikan apabila semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2007).

Sumber daya manusia sebagai pengguna sistem dituntut untuk memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemampuan untuk terus belajar dan mengasah kemampuan di bidang akuntansi. Di sini kemampuan sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (keterandalan dan ketepatwaktuan) (Indra Kesuma dkk, 2014).

Hal ini senada dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah. Dengan dimilikinya sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya mampu meningkatkan kualitas informasi pada pelaporan keuangan (Wiwik Andrini dalam I Putu Upabayu Rama Mahaputra, 2014).

Menurut Kokom selaku pegawai bagian akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diketahui bahwa yang terjadi pada Pemerintah Daerah, terdapat sumber daya manusia yang kurang terampil dan memahami Teknologi Informasi, itu disebabkankan oleh sebagian besar sumber daya manusia yang tidak memiliki *basic* akuntansi. Apalagi sekarang ini pemerintah baru saja mengganti metode pencatatannya dari *cash basic* menjadi *akrual basic* sehingga menimbulkan terjadinya keterlambatan penyampaian laporan keuangan (Kokom, Sistem Akuntansi BPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, 2018).

Pada kenyataan dilapangan masih ada permasalahan dalam aspek pengelolaan SDM di Pemprov DKI Jakarta. Meski pemrov DKI telah memiliki sistem kepegawaian berupa sistem informasi kepegawaian (SIMPEG), dan telah menyusun uraian tugas atas SDM pengelola keuangan dan aset, serta menyelenggarakan diklat untuk meningkatkan kompetensi SDM di bidang akuntansi berbasis akrual, namun database kepegawaian DKI belum lengkap dan mutakhir. Analisis jabatan dan beban kerja belum selesai disusun. Lalu distribusi SDM khususnya pengelola keuangan, aset, teknologi informasi dan preview

laporan keuangan belum memperhatikan kebutuhan sesuai kompetensi SDM. Gubernur Belum memperoleh komiten dari seluruh kepala SKPD untuk mendukung implementasi SAP berbasis akrual serta Anggaran untuk pelatihan peningkatan kompetensi SDM di bidang akuntansi berbasis akrual belum memadai. Dalam aspek teknologi informasi, Pemprov DKI telah memiliki beberapa aplikasi pengelolaan keuangan. Namun, sistem pengelolaan keuangan tersebut belum mampu menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual dan belum terintegrasi. Belum didukung keamanan akses data dan *disaster recovery* plan serta belum tersedia SDM pengelola teknologi informasi pada SKPD. (Efdinal,Ketua BPK DKI Jakarta 2015).

Pemerintah Daerah mengalami kesulitan dalam menyikapi munculnya serangkaian peraturan di bidang keuangan negara karena laporan keuangan merupakan hal yang baru bagi pemerintah daerah, dan masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang menguasai teknik pengelolaan keuangan daerah oleh karena itu dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) secara umum masih menunjukkan belum tertibnya laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah (Djadja Sukirman, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015).

Hasil pemeriksaan oleh BPK menilai kualitas penyusunan laporan keuangan di daerah rata-rata masih rendah sekali, terlihat dari masih sedikitnya daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Penilaian tersebut berdasarkan fakta masih sedikitnya pemerintah daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini

wajar tanpa pengecualian (WTP). Ini disebabkan karena masih belum memadai kualitas sumber daya manusia(SDM) (Harry Azhar Aziz, Ketua BPK RI, 2014).

Berdasarakan teori dan uraian fenomena diatas yang didukung dengan fakta – fakta yang ada, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **"Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah".**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah pengenalan-pengenalan masalah yang ada didalam latar belakang masalah (Ninit Alfianika, 2016 : 42). Berdasarkan Latar belakang yang telah di uraikan di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1.) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum menunjukan hasil yang maksimal.
2.) Masih lemahnya sumber daya manusia (SDM) dalam tata kelola penyusunan laporan keuangan.
3.) Belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah ditulis berdasarkan latar belakang masalah. Rumusan masalah adalah sentral dari penelitian. Apa yang menjadi permasalahan, itulah yang akan di cari jawabannya (Ninit Alfianika, 2016 :44).

Dari identifikasi masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1) Seberapa besar pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2) Seberapa besar pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4 Maksud dari Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengungkapkan hasil studi empiris mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang tergambar dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah (Ninit Alfianika, 2016 :45).

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2) Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian menurut (Khairani, 2016: 66) adalah untuk menjelaskan tentang manfaat dari penelitian itu sendiri. Memenuhi prinsip dasar dalam penelitian yaitu adanya kegunaan dari penelitian ini, maka penulis membagi menjadi dua segi kegunaan yaitu kegunaan praktis dan kegunaan akademis.

1.5.1 Kegunaan Praktis (Memecahkan Masalah / *Apllied Research*)

Menurut Uma Sekaran (2006:10) untuk kegunaan praktis atau akademik maka penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut meningkatkan pemahaman terhadap masalah pada judul yang diangkat yang kerap terjadi dan mencari metode untuk memecahkannya.

Dari pengertian di atas hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah bagi instansi dalam mengatasi kualitas baik buruk nya laporan keuangan pemerintah daerah yang belum baik. Berdasarkan konsep kerangka pikir yang telah dibangun, masalah pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih bisa diperbaiki dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia sehingga akan menjadi lebih baik dan sesuai yang diharapkan.

1.5.2 Kegunaan Akademis (Pengembangan Ilmu / *Basic Research*)

Menurut Uma Sekaran (2006:10), kegunaan akademis adalah untuk kepentingan pengembang keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat berguna menerapkan kembali hasil penelitian terdahulu untuk memecahkan masalah spesifik yang terjadi pada penelitian tersebut.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara akademis sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

   Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, dan juga memperoleh gambaran langsung tentang pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Instansi

   Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia yang diterapkan dalam menunjang kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi peneliti lain

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.